

Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah

Assistance in the Preparation of Action Plans for Child Decent District Programs in Central Lampung Regency

Simon Sumanjoyo Hutagalung^{1*}, Dedy Hermawan², Dody Faedlulloh³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung, Lampung, 35141 – Indonesia

*E-mail corresponding author: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

Received: 1 April 2024; Revised: 4 Juni 2024; Accepted: 23 November 2024

Abstrak. Program Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, bermain, belajar, dan berpartisipasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mencapai kondisi optimal dalam pencapaian program tersebut namun ada beberapa permasalahan, 1) Kegiatan yang tidak terkoordinasi untuk penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak, 2) Belum optimalnya penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak, dan 3) Kurangnya perencanaan aksi program kabupaten layak anak. Kondisi ini perlu diintervensi melalui kegiatan pendampingan dalam rangkaian proses penyusunan rencana aksi program sehingga dapat dihasilkan rumusan rencana aksi yang lebih komprehensif dan terukur. Metode kegiatan ini diterapkan dalam dua bentuk, yaitu pelatihan pengetahuan dan pelatihan manajemen dan bimbingan untuk memberikan dukungan dan arahan kepada mitra dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Kegiatan melibatkan 15 orang perwakilan dari beberapa OPD dilibatkan dalam penilaian program, sementara itu evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan kegiatan ini mampu mengoptimalkan kapasitas peserta kegiatan dalam penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak dan mampu mendorong koordinasi antar aktor dalam penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah. Kedua hal ini menunjukkan kondisi perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelum dilaksanakannya kegiatan ini.

Kata Kunci: kabupaten ramah anak; perlindungan anak; rencana aksi.

Abstract. The Child-Friendly Regency (KLA) Program aims to ensure the fulfillment of children's rights, such as the right to life, growth and development, play, learn, and participate. The Lampung Tengah Regency Government has achieved an optimal condition in achieving this program, but there are several problems, 1) Uncoordinated activities for the formulation of the action plan for the Child-Friendly Regency program, 2). Suboptimal formulation of the action plan for the Child-Friendly Regency program, and 3) Lack of planning for the Child-Friendly Regency program. This condition needs to be intervened through mentoring activities in the series of the action plan formulation process so that a more comprehensive and measurable action plan formulation can be produced. The method of this activity is applied in two forms is training is provided in the form of knowledge training and management training and guidance to provide support and direction to partners in applying the skills and knowledge they have acquired. The activity involved 15 representatives from several OPDs involved in the program evaluation, while the evaluation was conducted qualitatively using interview, observation and documentation techniques. The results of the activity evaluation show that this activity has been able to optimize the capacity of the participants in the formulation of the Child-Friendly Regency program action plan and tis activity has also been able to encourage coordination between actors in the formulation of the Child-Friendly Regency program action plan in Lampung Tengah Regency. Both of these things show a better change condition compared to before this activity was carried out.

Keywords: action plan; child friendly districts; child protection.

DOI: 10.30653/jppm.v9i4.918



1. PENDAHULUAN

Program Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota yang memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Program ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terintegrasi (Roza & Arliman, 2018). Adapun manfaat program KLA adalah sebagai berikut: (a). Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak. Program KLA bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak di Kabupaten/Kota tersebut terpenuhi secara menyeluruh dan terpadu. Hak-hak anak yang harus dipenuhi meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, hak bermain, berekreasi, dan berpartisipasi, hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, (b). Meningkatkan kualitas hidup anak. Pemenuhan hak-hak anak akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup anak. Anak-anak yang hak-haknya terpenuhi akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan (c). Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Program KLA juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Lingkungan yang kondusif meliputi lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Lingkungan fisik yang kondusif berarti lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Lingkungan sosial yang kondusif berarti lingkungan yang ramah anak, bebas dari diskriminasi, dan kekerasan (Rumtining, 2016). Lingkungan budaya yang kondusif berarti lingkungan yang menghargai hak-hak anak dan menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa. Secara umum, program KLA bermanfaat untuk mewujudkan kabupaten/kota yang ramah anak dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal (Aji dkk., 2021).

Pada lingkup Provinsi Lampung, capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Lampung Tengah telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, Lampung Tengah berhasil meraih peringkat Madya, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat Pratama. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, antara lain: (a). Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di Lampung Tengah, (b). Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Lampung Tengah, dan (c). Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan anak di Lampung Tengah.

Masyarakat dan dunia usaha juga telah berperan aktif dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di Lampung Tengah. Masyarakat telah berperan aktif dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak serta mengawasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dunia usaha telah berperan aktif dalam mendukung program-program KLA, antara lain dengan memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial bagi anak-anak walaupun telah berupaya melalui kerja keras dari seluruh pihak, Lampung Tengah tahun 2023 belum meraih peringkat utama dan masih berupaya meraih peringkat Utama dalam penilaian KLA pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dilatarbelakangi berbagai hambatan dan tantangan yang masih ditemukan pada beberapa sektor yang bersinggungan dengan program kabupaten Layak Anak.

Hambatan dan tantangan dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Lampung Tengah antara lain: (a). Kurang meratanya pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak di Lampung Tengah masih belum merata. Hal ini terlihat dari masih adanya anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak, (b). Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Masyarakat di Lampung Tengah masih belum sepenuhnya memahami hak-hak anak. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya praktik-praktik yang melanggar hak-hak anak, seperti perkawinan anak, pekerja anak, dan kekerasan terhadap anak, (c). Kurang tersedianya data dan informasi tentang pemenuhan hak-hak anak. Data dan informasi tentang pemenuhan hak-hak anak di Lampung Tengah masih belum tersedia secara lengkap dan akurat. Hal

ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KLA, serta (d). Kurang terintegrasinya program-program KLA. Program-program KLA di Lampung Tengah masih belum terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan program.

Cara mengatasi hambatan dan tantangan tersebut yaitu diperlukan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen dan anggaran dalam pelaksanaan program KLA (Mahmud & Suandi, 2020). Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar-pihak, baik antar-dinas/instansi pemerintah, maupun dengan masyarakat dan dunia usaha (Saputri & Erowati, 2020). Koordinasi yang baik akan membantu dalam mengintegrasikan program-program KLA dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program (Ilosa & Rusdi, 2020).

Salah satu titik lemah yang diidentifikasi adalah pada saat proses penyusunan rencana aksi program kabupaten Layak Anak yang melibatkan aktor lintas OPD. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kondisi tersebut, diantaranya pemahaman tentang hak-hak anak masih belum merata di kalangan pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha (Prihantika dkk., 2020). Hal ini dapat menyebabkan penyusunan rencana aksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak. Selain itu, koordinasi antar-pihak, baik antar-dinas/instansi pemerintah, maupun dengan masyarakat dan dunia usaha masih belum optimal (Yuniati dkk., 2021). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu diperlukan beberapa forum koordinasi untuk mengintegrasikan program-program KLA. Forum koordinasi ini dapat menjadi wadah untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program. Salah satunya adalah melalui pendampingan penyusunan rencana aksi program Kabupaten Layak Anak di Lampung Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan mitra sebagai berikut: (1). Belum terkoordinasinya kegiatan penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah, (2). Belum maksimalnya penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Lampung Tengah, serta (3). Belum tersusunnya perencanaan aksi program kabupaten layak anak di kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2024. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan ini memiliki tujuan meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu ada beberapa tujuan khusus yang hendak dicapai, yaitu: (a). Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah, (b). Memperkuat kapasitas tim penyusun rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah, dan (c). Membantu menyusun rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2024 yang terintegrasi, terukur, dan akuntabel.

2. METODE

Metode kegiatan yang tepat untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pendampingan adalah metode yang dapat menciptakan interaksi yang berkelanjutan antara pengabdian dan masyarakat (Suwarni dkk., 2020). Metode ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan oleh masyarakat secara mandiri (Kasim et al., 2022). Metode kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah melalui pendampingan yang diterapkan dengan dua kegiatan: (a). Pelatihan, adalah metode yang paling umum digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pendampingan. Pelatihan dalam kegiatan ini diberikan dalam berbagai bentuk pelatihan pengetahuan dan pelatihan manajemen dan (b). Bimbingan, adalah metode yang dapat digunakan untuk memberikan dukungan dan arahan kepada masyarakat dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Bimbingan pada kegiatan ini dilakukan secara kelompok dengan memandu proses penyusunan rencana aksi kegiatan Kabupaten Layak Anak Tahun 2024. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan metode pendampingan:

Tahap persiapan

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a). Identifikasi kebutuhan dan permasalahan kelompok sasaran. Pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan survei, (b). Penyusunan rencana kegiatan. Pengabdian menyusun rencana kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, metode, dan jadwal kegiatan, dan (c). Pembentukan tim pengabdian. Pengabdian membentuk tim pengabdian yang terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a). Penyelenggaraan kegiatan. Pengabdian melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan (b). Pendampingan. Pengabdian melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh.

Tahap evaluasi

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a). Penilaian hasil kegiatan. Pengabdian menilai hasil kegiatan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan dan (b). Refleksi. Pengabdian melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada kegiatan selanjutnya, dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, pengabdian dapat melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan metode pendampingan secara efektif dan efisien.

Khalayak sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan para pelaku penyusunan borang dan pendataan capaian indikator pada seluruh variabel dan indikator program Kabupaten Layak Anak. Terdapat ada 15 orang yang mengikuti kegiatan ini yang berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata. Adapun teknik evaluasi yang digunakan pada kegiatan ini adalah evaluasi secara kualitatif. Evaluasi kualitatif adalah evaluasi yang menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Yuliawan, 2021).

Bentuk evaluasi kualitatif untuk menilai capaian kegiatan pelatihan dapat berupa: (a). Wawancara, adalah metode yang paling umum digunakan dalam evaluasi kualitatif. Wawancara dapat dilakukan dengan narasumber, baik peserta pelatihan atau sosialisasi, maupun penyelenggara kegiatan (Supriyadi et al., 2021). Wawancara pada kegiatan ini digunakan untuk menggali informasi tentang persepsi, pemahaman, dan pengalaman peserta terhadap kegiatan pelatihan dan bimbingan yang telah dilaksanakan, (b). Observasi, adalah metode yang dapat digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pelatihan atau sosialisasi (Oktaviani dkk., 2021). Observasi pada kegiatan ini digunakan untuk melihat bagaimana peserta terlibat dalam kegiatan, serta bagaimana materi pelatihan dan bimbingan disampaikan, (c). Analisis dokumen, adalah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelatihan atau sosialisasi, seperti materi pelatihan atau sosialisasi, laporan kegiatan, dan tanggapan peserta. Pada kegiatan ini dilakukan pengecekan dan penilaian terhadap kelengkapan, kejelasan dan penyelesaian dokumen yang disusun oleh kelompok mitra.

Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam evaluasi kualitatif untuk menilai capaian kegiatan pelatihan atau pendampingan: (a). Apa yang Anda pelajari dari pelatihan atau sosialisasi ini?, (b). Apa manfaat yang Anda peroleh dari pelatihan atau sosialisasi ini?, (c). Apakah materi pelatihan atau sosialisasi ini sesuai dengan kebutuhan Anda?, dan (d). Bagaimana Anda menilai pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi ini?. Penggunaan bentuk evaluasi kualitatif ini diharapkan pengabdian dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang capaian kegiatan pelatihan. Evaluasi kualitatif juga dapat membantu pengabdian dalam menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana aksi program Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan dokumen yang memuat strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan kabupaten/kota yang layak anak (Gonibala dkk., 2022). Rencana aksi ini penting karena: (a). Menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Rencana aksi KLA disusun berdasarkan lima klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, dan hak bermain, berekreasi, dan berpartisipasi. Rencana aksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak di kabupaten/kota tersebut terpenuhi secara menyeluruh dan terpadu, (b). Meningkatkan kualitas hidup anak. Pemenuhan hak-hak anak akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup anak. Anak-anak yang hak-haknya terpenuhi akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, (c). Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, Rencana aksi KLA juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Lingkungan yang kondusif meliputi lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Lingkungan fisik yang kondusif berarti lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Lingkungan sosial yang kondusif berarti lingkungan yang ramah anak, bebas dari diskriminasi, dan kekerasan. Lingkungan budaya yang kondusif berarti lingkungan yang menghargai hak-hak anak dan menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan (d). Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Rencana aksi KLA disusun dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini untuk memastikan bahwa rencana aksi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak, serta dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Rencana aksi program KLA ini diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten/Kota yang layak anak dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal (Prasetya & Rahman, 2022). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dihadiri khalayak sasaran. Berikut pelaksanaan kegiatan dalam dua foto berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan bersama perwakilan OPD terkait

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Beliau berharap agar kegiatan itu dapat mengoptimalkan perencanaan rencana aksi program Kabupaten Layak Anak pada tahun mendatang. Perencanaan yang lebih baik akan menghasilkan identifikasi program dan pembagian kerja antar sektor yang lebih koordinatif. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan penyampaian materi oleh para narasumber secara panel dan bertahap, dimana masing-masing materi disampaikan melalui cara yang berbeda. Adapun susunan materi dan bentuk penyampaian materi tersebut dapat dicermati dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan bentuk penyampaian materi kepada khalayak sasaran (Sumber: Rencana Kegiatan 2023)

No.	Materi	Penyampaian
1	Analisis Implementasi Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Ceramah
2	Peluang dan Tantangan Program Kabupaten Layak Anak di Waktu Mendatang	Diskusi
3	Penyusunan rekomendasi, program kerja dan kegiatan pada level OPD	Simulasi
4	Kesepakatan Penyusunan Rencana Aksi untuk usulan Kabupaten Layak Anak	Penyimpulan

Materi analisis implementasi capaian indikator Kabupaten Layak Anak disampaikan dengan ceramah, dimana narasumber menyampaikan hasil analisis terhadap capaian indikator penilaian kabupaten Layak Anak di tahun sebelumnya. Pada tahap ini dikemukakan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan harus diperbaiki pada pengajuan usulan penilaian kabupaten Layak Anak di masa mendatang. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi bersama para khalayak sasaran tentang peluang dan tantangan program Kabupaten Layak Anak di Lampung Tengah.

Diskusi berlangsung secara dinamis dimana para peserta mampu menyampaikan informasi terhadap permasalahan yang mengakibatkan penilaian terhadap beberapa indikator kabupaten layak anak menjadi tidak optimal. Pada sesi ini juga dikemukakan masalah koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang perlu lebih diperhatikan. Masing-masing OPD perlu mempersiapkan aparatur yang siap untuk mendukung pencapaian program tersebut dengan penyediaan data yang siap dirujuk oleh tim operator.

Pada sesi ketiga, dilakukan simulasi berupa penyusunan rekomendasi program dan kegiatan pada beberapa OPD terkait. Simulasi ini didasarkan atas hasil kajian dan analisis implementasi capaian program layak anak pada tahun sebelumnya dan juga memperhatikan hasil diskusi yang mampu menggali secara lebih dalam permasalahan terkait penilaian program Kabupaten Layak Anak di Lampung Tengah. Berikut disajikan contoh desain simulasi berupa plotting rekomendasi program, kegiatan dan *leading sector* pelaksana program tersebut:

Gambar 2. Contoh plotting rekomendasi, program dan leading sector pelaksana (Sumber: Dokumen Penyusunan RKA 2023)

Komponen	Indikator	Rekomendasi	Program/Keg	Pelaksana
Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Kemitraan antar PD dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlunya memperbanyak mitra, misalnya dengan Rumah Sakit/Klinik/Praktik Mandiri yang tersebar di Wilayah Lampung Tengah, akan lebih baik jika minimal 1 Kecamatan ada 1 Mitra.	Mou/PKS dengan lebih banyak Mitra	DisdukCapil
Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Dinas PPA bersama Dinas Pendidikan perlu mendorong lebih banyak lembaga layanan informasi anak yang bisa terakreditasi PISA, diantaranya: (1). Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dikelola oleh pemerintah daerah, (2). Perpustakaan anak yang dikelola oleh pemerintah daerah atau lembaga non-pemerintah, (3). Taman bacaan anak yang dikelola oleh pemerintah daerah atau lembaga non-pemerintah, dan (4). Situs web dan media sosial yang menyediakan informasi tentang anak	Pendataan Lembaga Layanan Informasi yang dapat dikembangkan menuju terstandarisasi PISA Pelatihan/Workshop Pengelolaan Lembaga Layanan Informasi Sahabat Anak Pengusulan standarisasi PISA kepada Kemen PPA	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas PPA

Pada bagian akhir dilakukan penyimpulan atas pelaksanaan sesi sebelumnya yang berujung kepada kesepakatan bersama untuk mendukung pencapaian penilaian kabupaten layak anak yang lebih maksimal di tahun depan. Kesepakatan bersama ini juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait yang memiliki peran dalam

maksimalisasi penilaian indikator Kabupaten Layak Anak. Keseluruhan perwakilan dari OPD yang hadir bersepakat untuk menjadikan program Kabupaten Layak Anak sebagai sasaran penting bagi prestasi Kabupaten Lampung Tengah dimasa mendatang.

Pada bagian akhir dilakukan evaluasi untuk menilai capaian kegiatan pelatihan dengan cara wawancara kepada perwakilan peserta pelatihan yang berupaya untuk menggali informasi tentang persepsi, pemahaman, dan pengalaman peserta terhadap kegiatan pelatihan yang telah terlaksana, (a). Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan melihat bagaimana peserta terlibat dalam kegiatan, serta bagaimana materi pelatihan tersampaikan dan (b). Analisis dokumen, dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelatihan, seperti catatan pelatihan atau tanggapan peserta yang tertulis. Berikut hasil evaluasi yang dilakukan melalui wawancara kepada perwakilan khalayak sasaran terlibat:

Tabel 2. Evaluasi Kualitatif Melalui Wawancara Kepada Perwakilan Khalayak Sasaran Terlibat (Sumber: Analisis Data Wawancara, 2023)

No.	Pertanyaan	Kesimpulan
1	Apa yang Anda pelajari dari pelatihan ini?	Kegiatan ini mampu mempertemukan antar pelaku dan terlaksana refleksi bersama antar OPD, kemudian mampu melakukan penyusunan rencana aksi bersama dalam bentuk identifikasi program dan leading sector yang berperan.
2	Apa manfaat yang Anda peroleh dari pelatihan ini?	Kegiatan ini bermanfaat dalam menciptakan kesamaan persepsi terkait problem dan tantangan yang perlu dihadapi secara bersama dan didukung oleh kerjasama seluruh OPD terkait.
3	Apakah materi pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan Anda?	Materi yang disajikan sangat relevan dengan kebutuhan pendampingan para OPD dalam mengidentifikasi peran dan kontribusi mereka dalam pencapaian program Kabupaten Layak Anak di masa mendatang.
4	Bagaimana Anda menilai pelaksanaan pelatihan ini?	Kegiatan yang dilaksanakan sudah mampu menghadirkan evaluasi bersama, refleksi dan kesepakatan bersama antara berbagai OPD yang terlibat.

Tabel 2 di atas memperlihatkan jika para khalayak terlibat merasakan manfaat dan menganggap kegiatan ini telah sesuai dengan kebutuhan perwakilan OPD yang turut serta dalam penilaian indikator Kabupaten Layak Anak. Selain itu, observasi yang dilakukan selama kegiatan berlangsung juga menyimpulkan jika peserta sangat antusias dengan kegiatan ini yang ditandai dengan dinamika dalam diskusi dan penyampaian rekomendasi. Hampir seluruh peserta bersuara dan menyampaikan pandangannya terkait topik bahasan dalam diskusi. Evaluasi terhadap dokumen yang dibuat oleh peserta juga menunjukkan jika mereka telah paham substansi materi yang disampaikan dan mampu memberikan feedback yang sesuai dengan indikasi berupa catatan dan lembar masukan yang terisi oleh para peserta kegiatan. Oleh karena itu, memperhatikan ketiga bentuk evaluasi kegiatan tersebut, maka dapat disampaikan jika kegiatan ini telah mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki sebelumnya.

Kegiatan pendampingan penyusunan rencana aksi pada kegiatan Kabupaten Layak Anak di Lampung Tengah ini teridentifikasi beberapa temuan dan juga hambatan yang mengemuka dalam rangkaian kegiatan ini. Temuan dan hambatan tersebut antara lain sebagai berikut: (1). Masih minimnya Kesadaran dan Pemahaman Tentang Pentingnya Program Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal ini terlihat dari keterlibatan beberapa pihak mungkin belum memahami dengan baik tujuan dan manfaat Program KLA sehingga kurang antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, (2). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran, yang terpantau dari keterbatasan SDM yang memahami dan menguasai materi pelatihan tentang penyusunan rencana aksi KLA dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat memengaruhi kualitas dan jangkauan kegiatan pelatihan, seperti ketersediaan instruktur yang kompeten, materi pelatihan yang berkualitas, dan sarana prasarana yang memadai, (3). Minimnya Inisiatif koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini teramati dari kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang terkait dengan Program KLA dapat mengakibatkan

miskomunikasi dan inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya forum atau mekanisme komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan, dan (4). Kesulitan dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunan rencana aksi KLA memerlukan data dan informasi yang akurat tentang kondisi anak di Kabupaten Lampung Tengah. Kesulitan ini dapat menghambat proses penyusunan rencana aksi yang efektif dan terukur. Hambatan yang mengemuka dalam kegiatan pendampingan penyusunan rencana aksi kegiatan Kabupaten Layak Anak di Lampung Tengah dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Strategi tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

4. SIMPULAN

Kegiatan ini telah mampu mengoptimalisasi kapasitas peserta kegiatan dalam penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak yang dapat dilihat dari capaian ketiga bentuk evaluasi kegiatan, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kegiatan ini juga mampu mendorong koordinasi antar pelaku penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Tengah yang dapat diamati dari keterlibatan para perwakilan OPD terkait dalam acara ini sehingga dapat disimpulkan juga jika kegiatan ini sudah mampu untuk mendorong maksimalisasi penyusunan rencana aksi program kabupaten layak anak di Lampung Tengah dengan indikasi tersusunnya rekomendasi bagi proses formal perencanaan aksi program kabupaten layak anak di kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2024.

Ada beberapa rekomendasi strategi untuk mengatasi hambatan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kabupaten Layak Anak ini, diantaranya: (a). Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Program KLA kepada masyarakat luas, termasuk para pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Tengah, (b). Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan tentang penyusunan rencana aksi KLA, (c). Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan melalui pembentukan forum atau mekanisme komunikasi yang efektif, (d). Membangun sistem pendataan dan informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses terhadap data dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Lampung Tengah, dan (e). Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, advokasi, dan pemberdayaan. Diharapkan di masa mendatang akan ada kegiatan yang lebih intens dan detail mendampingi proses perencanaan dan impementasi penilaian kabupaten Layak Anak di Lampung Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Balitbangda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atas kesempatannya untuk melibatkan tim pengabdian serta seluruh pihak yang telah mendukung tim pengabdian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

REFERENSI

- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14–21.
- Gonibala, G. P., Waani, J. O., & Rompas, L. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana Dan Sarana) Ramah Anak Di Kota Kotamobagu. *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota Dan Sains*, 7(2).
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101.
- Kasim, M. R., Burhanuddin, M. A., Arifin, F. A., Nurana, S., Padhila, N. I., Gaffar, A. W. M., & Bakhri, S. (2022). Pendampingan Pemetaan Potensi Desa Di Desa Paddinging Kecamatan

- Sanrobone Kabupaten Takalar. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 428–436.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Oktaviani, L., Styawati, S., Lathifah, L., Lestari, Y. T., & Khadaffi, Y. (2021). Pkm peningkatan pemahaman guru mengenai penelitian tindakan kelas dan kualitatif di man 1 pesawaran. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 98–103.
- Prasetya, A., & Rahman, A. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 224–235.
- Prihantika, I., Atika, D. B., Puspawati, A. A., & Sulistiowati, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pekon Mataram Menuju Desa Layak Anak. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(1), 41–49.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Rumtaning, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Saputri, F. A., & Erowati, D. (2020). Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Kebumen Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 191–200.
- Supriyadi, S., Lia, R. M., Rusilowati, A., Isnaeni, W., Khumaedi, M., & Suraji, S. (2021). Evaluasi Program Pengabdian: Bimtek Penyusunan Tes Online Bagi Guru SD Di Banyubiru. *Journal of Community Empowerment*, 1(1), 19–24.
- Suwarni, L., Selviana, S., Octrisyana, K., & Vidyastuti, V. (2020). Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Relawan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Rasau Jaya Kalimantan Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 249–255.
- Yuliawan, K. (2021). Pelatihan SmartPLS 3.0 Untuk Pengujian Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1), 43–50.
- Yuniati, A., Adhan, S., & SAputra, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53–71